



Katalog BPS : 3201002.5103

DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008



BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BADUNG

**DISTRIBUSI PENDAPATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008**

ISBN : 979.473.100.5
No. Publikasi : 51032.0902
Katalog BPS : 3201002.5103
Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman : 40 + ix Halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Penyunting : Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

Jln. Mulawarman No. 11, Telp (0361) 437519, Fax (0361) 411887,

Denpasar 80111

E-mail : bps5103@telkom.net

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Om Swastyastu

Saya menyambut gembira dengan terbitnya publikasi Distribusi Pendapatan di Kabupaten Badung Tahun 2008 untuk mendukung kelengkapan dan monitoring perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

Kajian seperti ini sangat berguna dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan lebih terarah. Secara makro, informasi ini juga sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan sektoral maupun regional.

Indikator ini dapat memberi petunjuk secara kuantitatif tentang sejauh mana hasil-hasil pembangunan selama ini dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan data sehingga publikasi ini dapat diwujudkan.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat secara optimal dalam pengkajian pembangunan maupun penelitian lebih detail bagi konsumen data.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om.

Denpasar, Desember 2009

Kepala Bappeda Litbang

Kabupaten Badung

Kompyang R. Swandika, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19570201 198003 1 015

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan yang Maha Esa atas rahmatnya penyusunan kajian / buku Distribusi pendapatan di Kabupaten Badung telah dapat diselesaikan tepat waktu.

Publikasi ini merupakan salah satu kajian ekonomi makro untuk dapat menjelaskan disparitas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Publikasi ini mengungkapkan beberapa perbedaan yang terjadi antar wilayah karena adanya perbedaan struktural maupun perbedaan geografis yang menguntungkan.

Disadari masih terjadi beberapa kelemahan dalam analisa data karena kurang mendalamnya analisis yang ada, untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan ke depan kami terima dengan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga buku ini ada manfaatnya.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om

Badung, Desember 2009
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Badung

Ir. I GDE SUARSA, M.Si
NIP. 340006637

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Bappeda Litbang	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Kerangka Sampel	4
2.2. Rancangan Sampel	4
2.3. Metode Pengumpulan Data	5
2.4. Konsep Definisi	5
BAB III KONSEPSI TEORITIS	8
3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan	8
3.2. Beberapa Aspek Ketimpangan Distribusi Pendapatan	10
3.3. Ukuran Distribusi Pendapatan	12
3.3.1. Koefisien Gini/Gini Ratio	12
3.3.2. Kriteria Bank Dunia	14
BAB IV POLA KONSUMSI	15
4.1. Pengeluaran Perkapita	15
4.2. Pola Konsumsi	17

4.2.1. Konsumsi Makanan	21
4.2.2. Konsumsi Non Makanan	24
BAB V DISTRIBUSI PENDAPATAN	27
5.1. Kesenjangan Antara Daerah Perkotaan dan Perdesaan	30
5.2. Kesenjangan Regional Antar Kecamatan	30
BAB VI KESIMPULAN.....	32

<http://badungkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 - 2008	16
Tabel 2. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kecamatan, Tahun 2007 - 2008	16
Tabel 3. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2005 – 2008	18
Tabel 4. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran Dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 – 2008	19
Tabel 5. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten badung Menurut Kelompok, Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, 2008	20
Tabel 6. Proporsi Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Makanan Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Badung, 2008	22
Tabel 7. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Sub Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Badung, 2008	23
Tabel 8. Proporsi Pengeluaran Perkapita Sub kelompok Non Makanan Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Badung, 2008	25
Tabel 9. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Sub Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Badung, 2008	26
Tabel 10. Perkembangan Nilai Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2005-2008	27
Tabel 11. Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2005 – 2008	29

Tabel 12. Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Badung, Tahun 2007 - 2008	30
Tabel 13. Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Badung, Tahun 2007 – 2008	31

<http://badungkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kurva Lorentz	13
Gambar 2. Karakteristik Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung, 2008	19
Gambar 3. Proporsi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Untuk Sub Kelompok Makanan.....	21
Gambar 4. Proporsi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Untuk Sub Non Kelompok Makanan.....	24
Gambar 5. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung, 2005 – 2008	28
Gambar 6. Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung, 2005 – 2008 ...	29
Gambar 7. Gini Ratio Antar Kecamatan, 2008	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kecamatan Tahun 2008.....	34
Lampiran 2.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Kuta Selatan, Tahun 2008	35
Lampiran 3.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Kuta, Tahun 2008	36
Lampiran 4.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Kuta Utara, Tahun 2008	37
Lampiran 5.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Mengwi, Tahun 2008	38
Lampiran 6.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Abiansemal, Tahun 2008	39
Lampiran 7.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Petang, Tahun 2008	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perubahan persepsi mengenai hakekat pembangunan ekonomi, banyak pihak di negara-negara kaya maupun negara-negara miskin yang tidak lagi meyakini pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan nomor satu yang harus selalu dikejar-kejar dan diutamakan. Negara-negara maju mulai lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang antara lain tercermin dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Pola pikir semacam ini didasari oleh kesadaran bahwa daya dukung bumi terbatas dan pada akhirnya tidak akan mampu menyangga tingkat pertumbuhan yang tinggi secara terus menerus tanpa menimbulkan malapetaka ekonomi dan sosial.

Di negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sangat sulit diwujudkan secara bersamaan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Products* (GNP) yang tinggi, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara cepat dilakukan dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi padat modal yang notabene dikuasai oleh kaum elit kaya raya yang minoritas. Sehingga hasilnya pun kurang dapat dinikmati oleh mayoritas rakyat miskin. Hal ini akan memperparah ketimpangan pendapatan dan meningkatkan jumlah kemiskinan absolut. Sebaliknya jika yang digerakkan adalah sektor-sektor ekonomi padat karya yang notabene digeluti oleh mayoritas rakyat miskin maka target pertumbuhan ekonomi secara agregat akan sulit dicapai.

Kini baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang mulai muncul tuntutan untuk meninjau kembali tradisi “pengutamaan GNP” sebagai sasaran kegiatan ekonomi yang utama. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan mulai dikedepankan sebagai fokus utama pembangunan. Di Indonesia hal tersebut dilakukan melalui berbagai program diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Inpres Desa

Tertinggal (IDT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan lain sebagainya. Meskipun demikian kesenjangan dan ketidakadilan hingga saat ini masih merupakan pekerjaan rumah yang belum dapat terselesaikan secara tuntas.

Mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan pendapatan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang semakin tinggi pula. Menurut Ernest Engel, "Bila selera tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan". Meningkatnya pendapatan masyarakat akan menggeser pola konsumsi masyarakat dari lebih banyak mengkonsumsi makanan menjadi lebih banyak mengkonsumsi bukan makanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya hal itu dapat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mulai mengalami peningkatan.

Kondisi geografis dengan keunggulan komparatif yang dimiliki sering dirasakan telah memberikan berkah yang berbeda dalam upaya memacu pembangunan sehingga efek ganda yang ditimbulkan mampu meningkatkan pendapatan yang berbeda pula. Dengan kata lain bahwa faktor geografis dan lingkungan strategis akan dapat menghasilkan perbedaan kemajuan pembangunan seperti dikotomi daerah kota dan desa, serta daerah pariwisata dan non pariwisata, seperti kita rasakan Badung Utara dan Badung Selatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kajian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pembangunan di Kabupaten Badung telah diikuti dengan distribusi pemerataannya.

Adapun tujuannya untuk mengungkapkan beberapa indikator ekonomi makro sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Badung. Secara spesifik publikasi ini mempunyai dua tujuan yaitu :

- a) Mengetahui pola konsumsi penduduk di Kabupaten Badung menurut kecamatan dan klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan.
- b) Menghitung distribusi dan kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Badung menurut kecamatan dan klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008. Survei ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun sampel untuk Kabupaten Badung sebanyak 640 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Badung.

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan secara sistematis dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

- BABI Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.
- BAB II Metodologi, berisi ruang lingkup, metode pengumpulan data, pengolahan data, metode analisis dan konsep dan definisi.
- BAB III Pengeluaran perkapita dan pola konsumsi penduduk menurut klasifikasi daerah dan kecamatan.
- BAB IV Distribusi pendapatan menurut klasifikasi daerah dan kecamatan.
- BAB V Kesimpulan

BAB II

METODOLOGI

2.1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 terdiri dari kerangka sampel untuk pemilihan kecamatan (khusus daerah pedesaan), kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga.

Kerangka sampel untuk pemilihan kecamatan di daerah pedesaan adalah daftar kecamatan dalam setiap kabupaten/kota yang telah diurutkan menurut letak geografis.

Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar sampel blok sensus yang dibedakan menurut blok sensus yang terletak di daerah kota besar, kota sedang, dan kota kecil di setiap kabupaten/kota. Untuk daerah pedesaan, pemilihan blok sensus menggunakan daftar blok sensus yang terdapat dalam setiap kecamatan terpilih.

Kerangka sampel untuk memilih rumahtangga adalah daftar rumahtangga hasil listing yang terdapat dalam daftar VSEN2008-L Blok IV.

2.2. Rancangan Sampel

Rancangan Sampel Susenas 2008 adalah rancangan sampel bertahap dua (*Two Stage Sampling*) untuk daerah perkotaan dan rancangan sampel bertahap tiga untuk daerah pedesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan dilakukan secara terpisah.

Untuk daerah perkotaan, tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara linier sistematis sampling.

Untuk daerah pedesaan, tahap pertama, dari kerangka sampel kecamatan dipilih sejumlah kecamatan secara *probability proportional* terhadap banyaknya rumahtangga dalam kecamatan. Tahap kedua, dari setiap kecamatan terpilih, dipilih sejumlah blok sensus secara linier sistematis sampling. Dan tahap terakhir, dari setiap blok sensus terpilih, dipilih 16 rumahtangga juga secara linier sistematis sampling.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama menanyakan keterangan tentang rumahtangga kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mewakilinya, dan tahap kedua menanyakan keterangan individu kepada masing-masing anggota rumah tangga.

2.4. Konsep Definisi

- **Koefisien Gini/Gini Ratio** adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan suatu masyarakat/bangsa atau suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio* berarti semakin merata distribusi pendapatannya
- **Kurva Lorenz** didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumahtangga/penduduk dan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
- **Kerangka Contoh Induk (KCI)** adalah daftar yang berisi identitas wilayah pencacahan dengan muatan-muatannya yang digunakan dalam tahapan pengambilan sampel wilayah.
- **Wilayah Pencacahan** adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang mempunyai batas-batas alam maupun buatan dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu sepuluh tahun.
- **Blok Sensus** adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah.

Kriteria Blok Sensus adalah sebagai berikut:

- Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.
- Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas Satuan Lingkungan Setempat (SLS) seperti: RT, RW, Dusun, Lingkungan, dan sebagainya, diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan)
- Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Ada tiga jenis Blok Sensus, yaitu:

- Blok Sensus Biasa (B) adalah blok sensus yang sebagian besar muatannya antara 80 sampai 120 rumahtangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.
 - Blok Sensus khusus (K) adalah Blok Sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang kecuali Lembaga Pemasyarakatan tidak ada batas muatan. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus antara lain : Asrama militer (Tangsi). Daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga.
 - Blok Sensus Persiapan (P) adalah blok sensus yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas permukiman yang terbakar.
- **Segmen** adalah bagian dari blok sensus yang mempunyai batas yang jelas. Biasanya segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumahtangga atau bangunan fisik.
 - **Satuan Lingkungan Setempat (SLS)** adalah satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun atau lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong.
 - **Bangunan Fisik** adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk, dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan), jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.
 - **Bangunan Sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.
 - **Rumahtangga Biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumahtangga Biasa umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak.

- **Rumahtangga Khusus** mencakup : orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat atau asrama TNI (tangsi). Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumahtangga khusus. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, dan sejenisnya. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.
- **Kepala Rumahtangga (KRT)** adalah seorang dari sekelompok anggota rumahtangga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari rumahtangga. Atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumahtangga.
- **Anggota Rumahtangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumahtangga, baik yang berada di rumahtangga pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada.
- **Pengeluaran rumahtangga sebulan** adalah biaya yang biasanya dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi rumahtangga. Konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu (i) konsumsi makanan dan (ii) bukan makanan, tanpa memperhatikan asal barang.
- **Penduduk** adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal dalam satu wilayah baik sifatnya tetap atau sementara akan menetap lebih dari 6 bulan lamanya.

BAB III

KONSEPSI TEORITIS

3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan

Menurut Blakely, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2000). Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah yang berasaskan pada terwujudnya pembangunan nasional.

Banyak orang yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu dibarengi kenaikan dalam ketimpangan distribusi pendapatan atau disebut dengan ketimpangan relatif. Dengan kata lain, para ekonom berpendapat bahwa antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan distribusi pendapatan terdapat suatu *trade off*, yang membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu akan disertai penurunan dalam distribusi pendapatan atau kenaikan dalam ketimpangan relatif.

Demikian pula dengan Rozy Munir (1986), melihat ada dua kelompok pendapat yang berbeda. Dua hal pertumbuhan dan pemerataan. Kelompok pertama menekankan pertumbuhan ekonomi dan kelompok kedua berupaya untuk melakukan pemerataan lebih awal daripada pertumbuhan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui perluasan industri dan penetapan harga yang dapat memacu peningkatan

kemampuan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*). Sedangkan kelompok kedua memiliki pandangan bahwa strategi pembangunan yang memacu pada laju pertumbuhan ekonomi (GNP) saja, akan menuai kegagalan seperti pengangguran, pertumbuhan pendapatan yang sangat timpang, melebarnya jarak antara kaya dan miskin. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok ini menyarankan agar pembangunan ekonomi dibarengi dengan investasi yang mengarah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan industri yang mengarah padat karya dan menyentuh pada kelompok miskin.

Menurut para kritikus, pembangunan ekonomi bukan hanya menyebabkan kenaikan dalam ketimpangan relatif, tetapi lebih parah lagi akan membawa pula kemerosotan taraf hidup absolut dari golongan miskin. Dengan kata lain, bukan saja ketimpangan relatif tetapi juga kemiskinan absolut akan bertambah akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hasil-hasil penelitian pertama mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh Prof. Simon Kuznets dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal pada umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut.

Untuk mempercepat pemerataan terjadi, Sigit Hananto (1980) mengemukakan pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi hendaknya ditunjang dengan tingkat tabungan yang tinggi untuk memungkinkan adanya akumulasi modal.

Berkenaan dengan hal di atas, Both Anne dan Sundrun dalam Arndt (1983) melihat ada dua masalah yang agak jelas, yaitu : (1) Terdapat indikasi bahwa orang kaya di negara seperti Indonesia memang benar-benar membelanjakan kekayaan baru mereka, untuk dinikmati sendiri daripada menabung atau menginvestasikannya. (2) Di pihak lain, sejumlah penduduk Indonesia mempunyai pendapatan yang rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan perumahan. Selanjutnya disimpulkan bahwa untuk menjamin seluruh sektor dalam masyarakat agar memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang diperlukan peningkatan investasi pada kegiatan yang secara langsung produktif,

dan harus diikuti pula dengan kemajuan dalam prasarana pendidikan sehingga seluas mungkin masyarakat dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Lebih lanjut, Todaro (2000) mengatakan meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting setiap program pembangunan realistik yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan.

Jika dilihat dari hasil penelitian dan data-data statistik dalam dasawarsa yang lalu, akan terlihat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat namun pertumbuhan yang pesat ini telah membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk. Meskipun pertumbuhan mampu mengurangi persentase penduduk miskin namun di lain pihak sebagian penduduk miskin menjadi semakin miskin. Dengan demikian, Indonesia belum termasuk kelompok negara-negara berkembang yang telah berhasil dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan distribusi pendapatan yang makin merata serta pengurangan kemiskinan absolut yang lebih pesat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan berarti suatu pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya

Kenyataan bahwa Indonesia belum mampu melaksanakan pemerataan pembangunan mengharuskan kita untuk juga memikirkan cara lain yang perlu ditempuh agar Indonesia dalam tahun-tahun mendatang lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan juga adalah strategi pembangunan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

3.2. Beberapa Aspek Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Procovitch pernah menyampaikan beberapa dugaannya tentang sebab-sebab terjadinya kepincangan pembagian pendapatan yakni pertumbuhan

ekonomi, pertumbuhan penduduk, perkembangan kota desa, dan sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis. Beberapa aspek yang telah diduga oleh Procovits pada tahun 1955 dikembangkan oleh Kuznets, yang sampai dewasa ini masih dikenal dengan hipotesa Kuznets, yang menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti distribusi pendapatan di berbagai negara. Hipotesa ini menyatakan bahwa hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepincangan pembagian pendapatan pada tahap ini menjadi negatif. Jadi, tahap pertama pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, stabil dan akhirnya menurun. Pola perkembangan ini menurut Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Penyebabnya adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak yang progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal.

Chiswick menyatakan bahwa dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, kesenjangan pembagian penghasilan masyarakat juga meningkat, karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya ; sementara, kesempatan pendidikan sangat terbatas. Tingkat partisipasi penduduk dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan jumlah penduduk muda yang sedang sekolah atau sedang bekerja. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, dan hal ini akan membuat pembagian pendapatan semakin senjang. Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, berakibat berkurangnya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah sehingga akibat selanjutnya adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun.

Mengingat demikian luasnya ruang lingkup yang mencakup berbagai kemungkinan faktor penyebab ketidakmerataan pembagian pendapatan. Esmara Hendra (1976) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembagian pendapatan tidak seluruhnya dapat dinyatakan secara kuantitatif, tetapi faktor-faktor kualitatif yang terdapat di dalamnya juga sangat penting. Keseluruhan faktor tersebut biasanya dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu : (1) aspek ekonomi makro, yang mencakup struktur perekonomian

suatu negara. Kerangka ini biasanya memperhatikan aspek-aspek pertanian dan non pertanian kota dan pedesaan, tingkat pembangunan daerah, kesempatan kerja, dan kekayaan. (2) Aspek ekonomi mikro yang mencoba menjelaskan ketimpangan pembagian pendapatan dengan memperhatikan kapasitas masing-masing individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas tersebut seperti umur, pendidikan, lamanya hari kerja, jabatan, dan sebagainya.

Sigit Hananto (1980) menambahkan bahwa perubahan pembagian pendapatan juga disebabkan karena adanya perbedaan status tenaga kerja, seperti ada pengusaha, buruh, pegawai, pekerja sendiri, dan ada pula pekerja keluarga. Perbedaan status tenaga kerja inilah yang mengakibatkan pergeseran pembagian pendapatan dalam suatu sektor ekonomi. Perbedaan antar sektor sebenarnya dapat diterima, karena mau tak mau pasti terjadi perbedaan pertumbuhan produk antar sektor, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ditekankan agar perbedaan antar status tenaga kerja dalam suatu sektor dijaga jangan sampai semakin melebar.

3.3. Ukuran Distribusi Pendapatan

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk berbagai kajian kuantitatif dan analisis kualitatif. Ukuran tersebut adalah : (1) Ukuran Distribusi, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang atau rumahtangga, dan (2) Distribusi Fungsional atau distribusi kepemilikan faktor produksi (Todaro, 2000).

3.3.1. Koefisien Gini/*Gini Ratio*

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah *Gini Ratio*. Nilai *gini ratio* berkisar antara nol dan satu. Bila *gini ratio* sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun bila *gini ratio* sama dengan satu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai *gini ratio*

maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio* berarti semakin merata distribusinya. Pada prakteknya nilai *Gini Ratio* berkisar 0,50 – 0,70 dikategorikan ketimpangan tajam, sedangkan nilai *Gini Ratio* berkisar 0,20 – 0,35 ketimpangan relatif baik (merata).

Gini Ratio dapat digambarkan dengan suatu kurva yang disebut dengan Kurva Lorentz. Kurva ini memberi gambaran tentang bagaimana pendistribusian pendapatan penduduk suatu wilayah atau daerah pada suatu waktu. Kurva Lorentz didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumah tangga/penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh rumah tangga/penduduk daerah tersebut, apabila unit pendapatan ditata menurut urutan menaik.

Rumus untuk menghitung *gini ratio* adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dimana :

G = *Gini ratio*

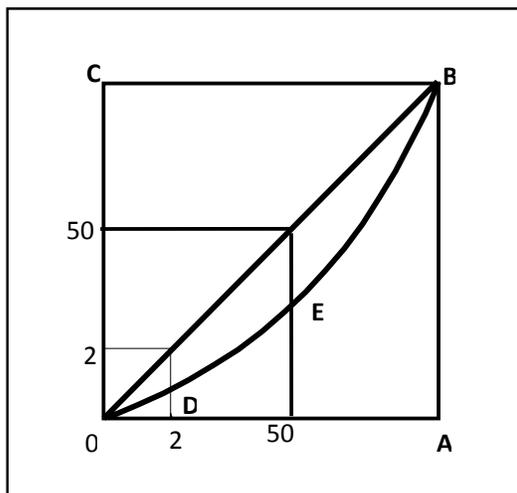
P_i = Persentase rumah tangga/penduduk pada kelompok pendapatan ke-i)

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i)

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i-1)

K = Banyaknya kelompok pendapatan.

Gambar 1.
Kurva Lorentz



OC = Persentase kumulatif pendapatan

OA = Persentase kumulatif penduduk

OB = Diagonal Gini

D = menunjukkan bahwa 20 persen penduduk menikmati sekitar 8 persen pendapatan. Idealnya adalah 20 persen, demikian pula E identik dengan D. Makin jauh garis ODEB dari diagonal OB makin senjang tingkat pendapatan.

3.3.2. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk menurut kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: pertama; 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kedua; 40 persen penduduk berpendapatan menengah, ketiga; 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Untuk melihat pemerataan pendapatan, Bank Dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

- a) Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan rendah atau ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.
- b) Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima antara 12 persen sampai 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan sedang atau ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- c) Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan tinggi atau ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

BAB IV

POLA KONSUMSI

4.1. Pengeluaran Perkapita

Tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka penduduk dikatakan semakin sejahtera. Tetapi karena data pengeluaran lebih teliti dibandingkan data pendapatan dan dianggap cukup representatif menggambarkan tingkat pendapatan penduduk maka data pengeluaran digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk makanan meliputi pengeluaran untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih. Pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Pengeluaran untuk makanan dihitung menggunakan pendekatan *consumption approach* artinya yang dihitung sebagai pengeluaran adalah yang sudah benar-benar dikonsumsi selama masa referensi (seminggu yang lalu). Sedangkan pengeluaran untuk non makanan dihitung menggunakan *delivery approach* artinya yang dihitung sebagai konsumsi/pengeluaran adalah barang-barang yang sudah dibeli (meskipun belum lunas)/diperoleh/digunakan oleh anggota rumah tangga selama masa referensi (sebulan yang lalu dan setahun yang lalu).

Selama 4 tahun terakhir secara nominal pengeluaran penduduk Badung mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2005, rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp.460.391,- perkapita perbulan. Pada tahun 2006 naik

menjadi Rp. 426.897,- perkapita perbulan, sementara pada tahun 2007 naik menjadi Rp. 444.374,- perkapita perbulan. Pada tahun 2008 naik menjadi Rp.654.851,- perkapita perbulan. Sepintas kenaikan tersebut terlihat fantastis, namun perlu diingat bahwa kenaikan tersebut juga disumbang oleh kenaikan harga barang (inflasi).

Tabel 1. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 - 2008

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2006	479,473	332,432	426,897
2007	470,801	396,667	444,374
2008	721,260	480,359	654,851

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Ditinjau menurut klasifikasi daerahnya, secara umum pengeluaran perkapita di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini terjadi karena kebutuhan penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Tabel berikut ini menunjukkan pengeluaran perkapita penduduk menurut klasifikasi daerah tempat tinggalnya.

Tabel 2. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kecamatan, Tahun 2007 - 2008

Kecamatan	2007	2008
Kuta Selatan	498,021	733,995
Kuta	492,113	775,756
Kuta Utara	518,930	749,873
Mengwi	385,920	619,371
Abiansemal	408,470	507,912
Petang	342,564	336,519
Badung	444,374	654,851

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Kecamatan Kuta Utara merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Badung. Pada tahun 2007 rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Kecamatan Kuta Utara mencapai Rp. 518.930,- dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 749.873,-. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Badung yang hanya sebesar Rp. 444.374,- pada tahun 2007 dan Rp. 654.851,- pada tahun 2008. Kecamatan lain yang rata-rata pengeluaran perkapita penduduknya berada di atas pengeluaran perkapita Kabupaten Badung adalah Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Kuta. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di tiga kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran perkapita Kabupaten Badung. Hal ini mencerminkan adanya dikotomi pembangunan antara Badung Utara (Mengwi, Abiansemal, Petang) dengan Badung Selatan (Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara). Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan sarana dan prasarana yang ada serta perbedaan lapangan usaha di kedua wilayah tersebut. Di wilayah Badung Selatan, penduduk umumnya bekerja di sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa) sementara wilayah Badung Utara lebih dominan pada sektor primer (pertanian dalam arti luas).

4.2. Pola Konsumsi

Perilaku konsumsi masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengelompokan pengeluaran menjadi pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan digunakan untuk melihat kecenderungan konsumsi rumah tangga dari waktu ke waktu. Kecenderungan tersebut biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, selera dan lingkungan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan

makanan. Ernest Engel mengemukakan bahwa semakin tinggi pengeluaran rumahtangga dapat mengindikasikan semakin sejahtera masyarakatnya. Demikian juga halnya, semakin sejahtera suatu masyarakat cenderung memiliki pengeluaran non makanan lebih besar dari konsumsi makanan

Pergeseran konsumsi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Tabel 3. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2005 - 2008

Jenis Pengeluaran	2005		2006		2007		2008	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pengeluaran makanan perkapita	209.927	45,54	188.376	44,13	208.660	46,96	284.559	43,45
Pengeluaran non makanan perkapita	251.003	54,46	238.521	55,87	235.714	53,04	370.292	56,55
Pengeluaran perkapita	460.931	100,00	426.897	100,00	444.374	100,00	654.851	100,00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Dari hasil pengolahan data Susenas 2008, diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Badung menggunakan 43,45 persen pendapatannya atau sebesar Rp. 284.559,- untuk konsumsi makanan sedangkan sisanya sebesar 56,55 persen atau sebesar Rp. 370.292,- untuk konsumsi non makanan. Secara umum pola seperti ini tidak mengalami banyak perubahan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 misalnya, rata-rata penduduk Kabupaten Badung menggunakan 46,96 persen pendapatannya untuk konsumsi makanan dan sebesar 53,04 persen untuk konsumsi non makanan. Hal serupa juga terjadi beberapa tahun sebelumnya. Dari tahun ke tahun terlihat kecenderungan penurunan proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi makanan.

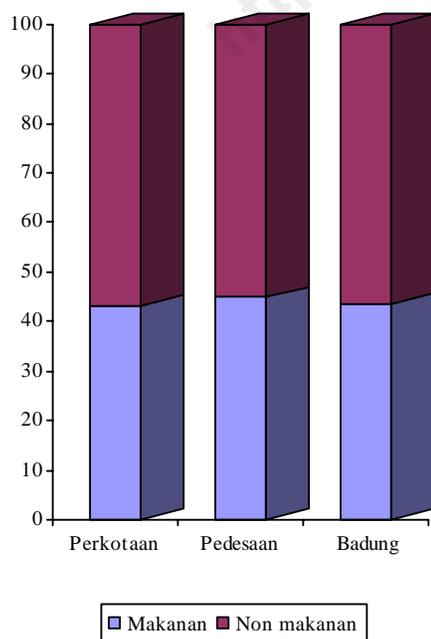
Pola konsumsi penduduk juga menunjukkan perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Dari tahun ke tahun pengeluaran penduduk yang tinggal di daerah perdesaan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini terjadi untuk semua jenis pengeluaran baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan.

Tabel 4. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 - 2008

Jenis Pengeluaran	2006			2007			2008		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
Pengeluaran makanan perkapita	209,701	150,062	188,376	220,152	187,914	208,660	310,768	215,694	284,559
Pengeluaran non makanan perkapita	269,772	182,370	238,521	250,649	208,753	235,714	410,492	264,666	370,292
Pengeluaran perkapita	479,473	332,432	426,897	470,801	396,667	444,374	721,260	480,359	654,851

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 2.
Karakteristik Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung, 2008



Pola konsumsi penduduk di daerah perdesaan di Kabupaten Badung ternyata tidak jauh berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Hasil Susenas 2008 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Badung yang tinggal di daerah perkotaan hanya menggunakan 43,09 persen pendapatannya untuk konsumsi makanan dan 56,91 persen untuk konsumsi non makanan. Sedangkan penduduk perdesaan menggunakan 44,90 persen penghasilannya untuk konsumsi makanan dan 55,10 persen untuk konsumsi non makanan.

Tabel 5. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kelompok, Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, 2008

Kelompok pengeluaran perkapita	Pengeluaran makanan perkapita	Pengeluaran non makanan perkapita	Pengeluaran perkapita
100 000 - 149 999	-	-	-
150 000 - 199 999	50.14	49.86	100.00
200 000 - 299 999	56.63	43.37	100.00
300 000 - 399 999	55.82	44.18	100.00
400 000 - 499 999	53.88	46.12	100.00
> 500 000	41.30	58.70	100.00
Perkotaan	43.09	56.91	100.00
100 000 - 149 999	54.98	45.02	100.00
150 000 - 199 999	48.74	51.26	100.00
200 000 - 299 999	58.64	41.36	100.00
300 000 - 399 999	54.20	45.80	100.00
400 000 - 499 999	51.99	48.01	100.00
> 500 000	37.76	62.24	100.00
Perdesaan	44.90	55.10	100.00
100 000 - 149 999	54.98	45.02	100.00
150 000 - 199 999	49.19	50.81	100.00
200 000 - 299 999	57.83	42.17	100.00
300 000 - 399 999	54.92	45.08	100.00
400 000 - 499 999	53.24	46.76	100.00
> 500 000	40.80	59.20	100.00
Perkotaan + Perdesaan	43.45	56.55	100.00

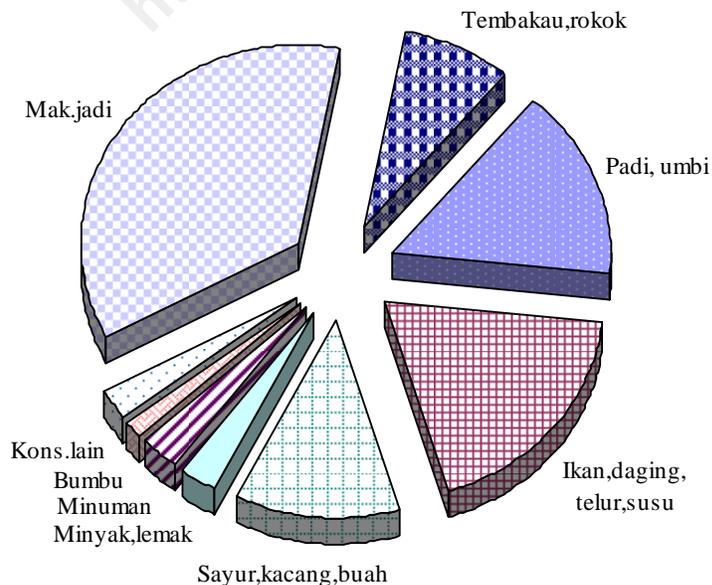
Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan pada awalnya akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, tetapi kemudian akan menurun setelah mencapai titik tertentu yaitu kondisi dimana konsumsi makanan sudah mencapai titik jenuh. Pada kondisi tersebut penduduk akan mengalihkan pengeluarannya untuk konsumsi non makanan sehingga proporsi pengeluaran untuk konsumsi non makanan cenderung meningkat.

4.2.1. Konsumsi Makanan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk tetap hidup, sehingga sebesar apapun pendapatan seseorang ia akan tetap berusaha untuk mendapatkan makanan yang memadai. Seseorang atau rumah tangga akan terus menambah konsumsi makanannya sejalan dengan bertambahnya pendapatan, namun sampai pada batas tertentu penambahan pendapatan tidak lagi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, karena kebutuhan manusia akan makanan pada dasarnya mempunyai titik jenuh. Bila secara kuantitas kebutuhan seseorang sudah terpenuhi maka lazimnya ia akan mementingkan kualitas atau beralih pada pemenuhan bukan makanan. Dengan demikian ada kecenderungan semakin tinggi pendapatan semakin berkurang persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Oleh karena itu komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dengan asumsi bahwa penurunan persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran merupakan gambaran membaiknya tingkat perekonomian penduduk.

Gambar 3.
Proporsi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung
Untuk Sub Kelompok Makanan, 2008



Berdasarkan hasil Susenas 2008, dari rata-rata Rp. 285.559,- yang digunakan untuk konsumsi makanan, proporsi terbesar digunakan untuk konsumsi makanan jadi yaitu sebesar 35,80 persen, kemudian disusul oleh konsumsi padi-padi dan umbi-umbian sebesar 15,63 persen. Sementara itu konsumsi komoditi sumber protein hewani seperti ikan, daging, telur dan susu juga cukup besar mencapai 18,48 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan yang hanya sebesar 12,17 persen. Di sisi lain konsumsi rokok dan tembaku masih cukup tinggi mencapai 8,11 persen dari total pengeluaran makanan. Gambar diatas memperlihatkan proporsi konsumsi makanan menurut jenis komoditinya.

Tabel 6. Proporsi Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Makanan Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Badung, 2008

Jenis Komoditi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Padi-padian	13.42	21.89	15.19
Umbi-umbian	0.42	0.49	0.44
Ikan	5.51	5.37	5.48
Daging	6.01	6.31	6.07
Telur susu	7.25	5.69	6.93
Sayur-sayuran	6.28	7.16	6.46
Kacang-kacangan	2.30	2.75	2.39
Buah-buahan	3.31	3.38	3.32
Minyak dan lemak	2.77	3.88	3.00
Bahan Minuman	2.84	3.55	2.99
Bumbu-bumbuan	1.43	1.65	1.47
Konsumsi lainnya	2.44	2.02	2.35
Makanan jadi	37.44	29.62	35.80
Rokok dan tembakau	8.60	6.23	8.11
Pengeluaran makanan perkapita	100.00	100.00	100.00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Secara umum pola konsumsi penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di kedua tipe daerah tersebut proporsi pengeluaran makanan terbesar digunakan untuk konsumsi makanan jadi meskipun lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Demikian pula halnya dengan konsumsi beras dan umbi-umbian yang lebih tinggi

di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Sedangkan untuk jenis komoditi lainnya menunjukkan pola yang serupa antara daerah perdesaan dan perkotaan.

Tabel 7. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Sub Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Badung, 2008

Jenis Komoditi	Kelompok pengeluaran perkapita							Total
	80 000 - 99 999	100 000 - 149 999	150 000 - 199 999	200 000 - 299 999	300 000 - 399 999	400 000 - 499 999	> 500 000	
Padi-padian	49.33	40.56	38.37	34.38	26.57	20.87	12.71	20.06
Umbi-umbian	6.57	3.43	2.24	1.72	0.99	0.78	0.55	0.86
Ikan/udang/cumi/kerang	2.09	4.38	5.46	5.34	5.70	5.61	5.27	5.42
Daging	-	1.48	1.69	2.97	4.43	5.76	6.47	5.40
Telur & susu	1.80	2.63	2.63	3.32	4.05	5.48	7.64	5.92
Sayuran	13.71	11.13	11.26	10.31	9.46	8.40	6.30	7.88
Kacang-kacangan	0.57	2.67	4.17	3.70	3.72	3.33	2.48	3.04
Buah-buahan	0.13	2.23	2.86	3.37	3.64	4.01	4.41	4.02
Minyak & lemak	6.69	5.69	5.66	5.70	4.93	4.15	3.03	3.98
Bahan minuman	4.84	4.95	4.98	4.87	4.27	3.81	2.86	3.59
Bumbu-bumbuan	2.12	2.27	2.12	1.83	1.88	1.79	1.51	1.69
Konsumsi lain	0.27	1.26	1.29	1.80	2.07	2.27	2.08	2.05
Makanan jadi	10.53	12.01	11.97	15.53	21.42	25.02	36.77	28.65
Rokok & tembakau	1.34	5.33	5.29	5.16	6.88	8.73	7.92	7.42
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

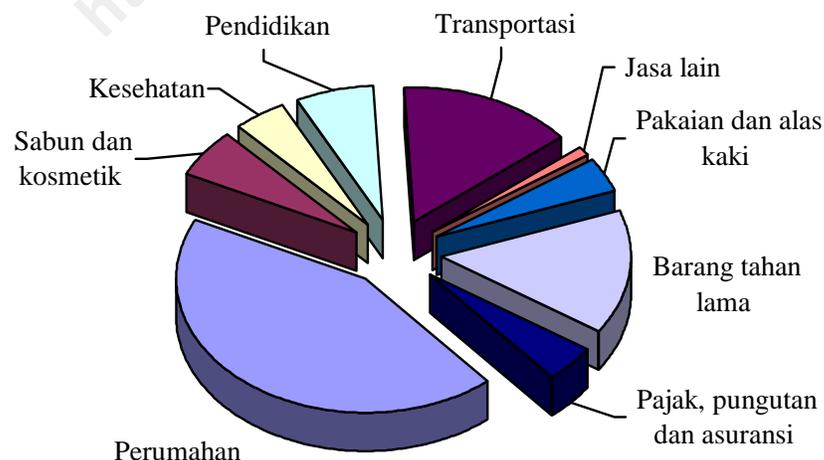
Perbedaan pola konsumsi juga dapat dilihat menurut golongan pengeluaran perkapita penduduk. Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk yang ditandai dengan semakin besar total pengeluarannya, maka proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi padi-padian dan umbi-umbian juga akan semakin kecil. Sebaliknya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi akan meningkat secara signifikan. Demikian pula halnya

untuk konsumsi makanan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan susu yang mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya total pengeluaran. Konsumsi tembakau dan rokok juga mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan peningkatan total pengeluaran.

4.2.2. Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran untuk non makanan terdiri dari pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, rata-rata konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Badung yang pada tahun 2008 sebesar Rp. 379.292,- masih didominasi oleh pengeluaran perumahan sebesar 43,44 persen, disusul oleh pengeluaran konsumsi barang tahan lama sebesar 15,02 persen dan pengeluaran untuk transportasi sebesar 15,01 persen. Sementara itu hanya sebesar 6,82 persen yang dialokasikan untuk biaya pendidikan, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan biaya kesehatan yang hanya 4,38 persen dari total pengeluaran non makanan.

Gambar 4.
Proporsi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Untuk
Sub Kelompok Non Makanan, 2008



Sama halnya dengan pengeluaran untuk konsumsi makanan, pengeluaran untuk konsumsi non makanan juga menunjukkan pola yang serupa antara perkotaan dan perdesaan. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal pola pengeluaran non makanan di kedua tipe daerah tersebut. Hal ini terjadi karena secara umum karakteristik penduduk yang tinggal di daerah perdesaan sudah menyerupai penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.

Tabel 8. Proporsi Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Non Makanan Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Badung, 2008

Jenis Komoditi	Perkotaan	Perdesaan	Total
Perumahan	43.58	42.88	43.44
Sabun dan kosmetik	5.55	6.37	5.71
Kesehatan	4.57	3.59	4.38
Pendidikan	6.47	8.26	6.82
Transportasi	14.03	18.97	15.01
Jasa lain	1.09	0.37	0.95
Pakaian dan alas kaki	4.20	4.75	4.31
Barang tahan lama	16.08	10.69	15.02
Pajak, pungutan dan asuransi	4.43	4.10	4.36
Pengeluaran non makanan perkapita	100.00	100.00	100.00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Perbedaan pola konsumsi juga dapat dilihat menurut golongan pengeluaran perkapita penduduk. Secara umum proporsi pengeluaran untuk perumahan menunjukkan penurunan seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal serupa terjadi pada proporsi pengeluaran untuk biaya kesehatan meskipun penurunannya tidak sebesar biaya perumahan. Sebaliknya proporsi pengeluaran untuk biaya pendidikan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sudah cukup tinggi. Proporsi pengeluaran untuk biaya transportasi juga menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini terjadi penduduk dengan tingkat pendapatan yang tinggi umumnya akan memilih alat transportasi yang lebih nyaman dan biasanya lebih mahal. Di sisi lain konsumsi pakaian juga cenderung menurun seiring dengan peningkatan pendapatan, berkebalikan dengan konsumsi barang tahan lama yang cenderung mengalami peningkatan.

**Tabel 9. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan
Untuk Sub Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi
dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Badung, 2008**

Jenis Komoditi	Kelompok pengeluaran perkapita							Total
	80 000 - 99 999	100 000 - 149 999	150 000 - 199 999	200 000 - 299 999	300 000 - 399 999	400 000 - 499 999	> 500 000	
Perumahan	59.13	58.58	52.79	52.01	49.44	46.28	38.65	41.85
Sabun dan kosmetik	8.08	9.48	8.85	8.75	7.55	6.49	4.93	5.71
Kesehatan	7.80	4.75	6.91	5.71	6.40	6.34	6.80	6.63
Pendidikan	1.62	4.49	6.18	5.22	5.18	5.38	6.57	6.17
Transportasi	0.67	9.46	12.35	13.29	15.53	14.95	12.91	13.48
Jasa lainnya	0.19	0.13	0.18	0.31	0.40	0.61	2.19	1.65
Pakaian	11.31	6.88	6.18	6.42	5.91	5.56	4.11	4.66
Barang tahan lama	1.10	2.23	2.72	4.38	5.48	10.09	19.15	15.33
Pajak	10.10	4.01	3.83	3.90	4.11	4.31	4.69	4.52
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

BAB V

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Perbedaan pola pembangunan antar wilayah ternyata tidak hanya menimbulkan perbedaan pola konsumsi penduduk, tetapi lebih jauh juga menimbulkan masalah bagaimana pendapatan daerah terbagi secara merata di antara penduduknya. Kesenjangan pendapatan penduduk pada akhirnya akan memunculkan berbagai permasalahan sosial di antaranya kemiskinan dan tindak kejahatan. Karena itu pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan jangka menengah 2005–2009. Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan membangun sarana dan prasarana fisik saja, tetapi juga perlu dijamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu dapat menjangkau kepentingan orang banyak. Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi semata, tetapi juga harus memperhatikan azas pemerataan tanpa mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Semakin tinggi nilai gini ratio maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai gini ratio berarti semakin merata distribusinya.

**Tabel 10. Perkembangan Nilai Gini Ratio Kabupaten Badung
Tahun 2005 - 2008**

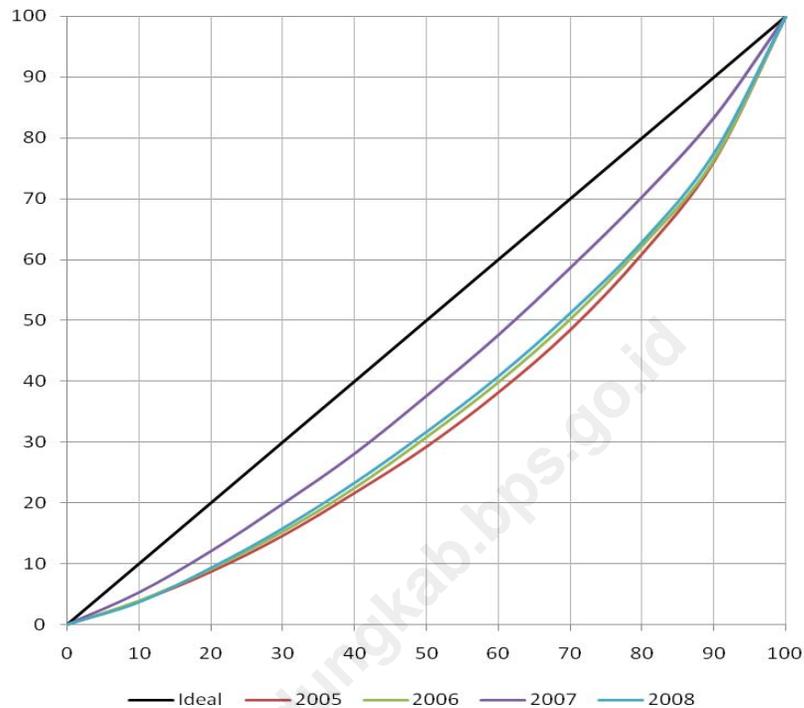
Tahun	Nilai Gini Ratio
2005	0,2966
2006	0,2794
2007	0,1740
2008	0,2673

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Hasil Susenas menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan pendapatan di Kabupaten Badung tergolong rendah. Pada tahun 2008 nilai Gini Ratio sebesar 0,2673. Dibandingkan dengan tahun 2007, angka ini mengalami peningkatan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan

diantara penduduk. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2005 nilai Gini Ratio justru mengalami penurunan.

Gambar 5. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung, 2005 - 2008



Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah kriteria Bank Dunia. Untuk melihat pemerataan pendapatan, Bank Dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok penduduk. Berdasarkan tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa selama kurun waktu 2005 sampai 2008 ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Badung tergolong rendah karena 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 persen total pendapatan. Namun demikian pemerataan pendapatan masih harus terus diupayakan karena ternyata hasil-hasil pembangunan justru paling dinikmati oleh 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa kelompok ini menerima lebih dari 35 persen dari total pendapatan.

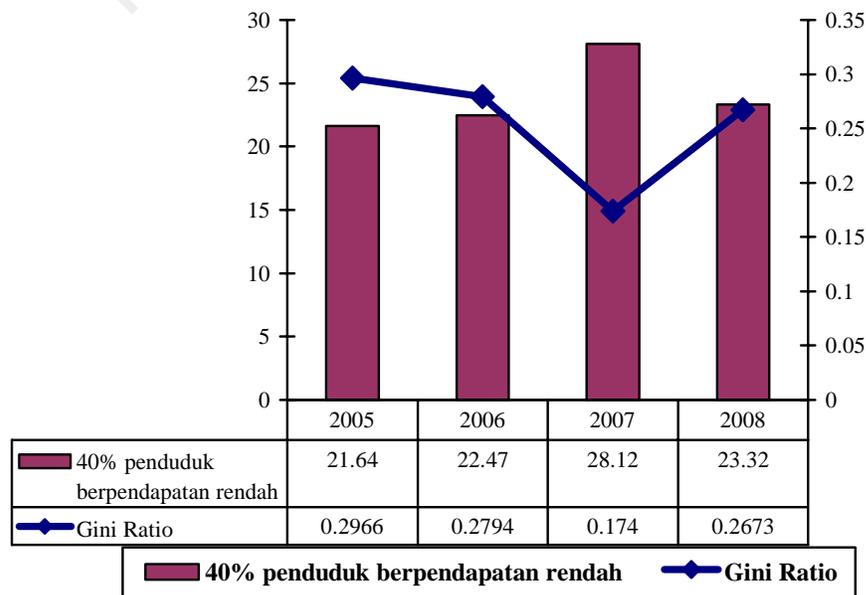
Tabel 11. Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2005 - 2008

Kriteria penduduk	2005	2006	2007	2008
40% penduduk berpendapatan rendah	21,64	22,47	28,12	23,32
40% penduduk berpendapatan menengah	39,30	39,80	42,21	39,58
20% penduduk berpendapatan tinggi	39,06	37,74	29,67	37,10

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar berikut memperlihatkan kaitan antara Gini Ratio dengan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Semakin tinggi persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah maka nilai Gini Ratio akan menurun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan menurun atau dengan kata lain pemerataan pendapatan meningkat. Sebaliknya jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah menurun maka nilai Gini Ratio akan meningkat yang berarti mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan atau penurunan pemerataan pendapatan.

Gambar 6.
Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung, 2005-2008



5.1. Kesenjangan Antara Daerah Perkotaan dan Perdesaan

Secara umum terjadi perbedaan ketimpangan antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan. Nilai Gini Ratio daerah perdesaan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Ini berarti ketimpangan pendapatan di daerah perdesaan sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Demikian pula halnya dengan proporsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Pada tahun 2008, di daerah perdesaan, 40 persen penduduk berpendapatan rendah mengkonsumsi 24,56 persen dari total pendapatan penduduk. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan dimana 40 persen penduduk berpendapatan rendah hanya mengkonsumsi sebesar 24,15 persen dari total pendapatan penduduk.

Tabel 12. Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Kabupaten Badung, Tahun 2007-2008

Daerah	Gini Ratio		40% penduduk berpendapatan rendah		40% penduduk berpendapatan menengah		20% penduduk berpendapatan tinggi	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Perkotaan	0.1709	0.2510	28.70	24.15	41.63	39.79	29.68	36.06
Perdesaan	0.1612	0.2500	29.53	24.56	41.46	40.35	29.01	35.09
Perkotaan + Perdesaan	0.1740	0.2673	28.12	23.32	42.21	39.58	29.67	37.10

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

5.2. Kesenjangan Regional Antar Kecamatan

Secara umum, seiring dengan peningkatan pendapatan terjadi pula peningkatan ketimpangan. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan nilai Gini Ratio untuk masing-masing kecamatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, ketimpangan tertinggi terjadi Kecamatan Kuta Selatan dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,3056 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Gini Ratio Kabupaten Badung yang hanya sebesar 0,2673. Proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah hanya sebesar 21,43 persen, paling rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Badung. Sementara itu ketimpangan terendah terjadi di Kecamatan Kuta dengan nilai Gini

Ratio sebesar 0,1863 dimana 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 27,66 persen dari total pendapatan penduduk.

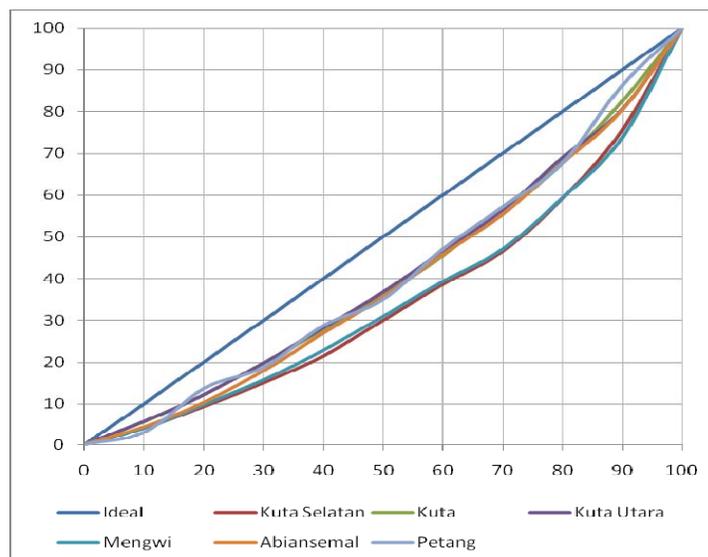
Tabel 13. Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Badung, Tahun 2007-2008

Kecamatan	Gini Ratio		40% penduduk berpendapatan rendah		40% penduduk berpendapatan menengah		20% penduduk berpendapatan tinggi	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Kuta Selatan	0.1547	0.3056	30,14	21.43	42,18	37.75	27,67	40.82
Kuta	0.1777	0.1863	27,35	27.66	42,46	40.13	30,18	32.21
Kuta Utara	0.1476	0.1922	30,26	28.23	42,04	40.72	27,71	31.05
Mengwi	0.1612	0.2971	29,36	22.81	41,78	36.51	28,85	40.68
Abiansemal	0.1464	0.2115	29,54	26.92	43,15	40.73	27,30	32.35
Petang	0.1592	0.1942	27,36	28.73	42,90	38.88	29,73	32.38
Badung	0.1740	0.2673	28,12	23.32	42,21	39.58	29,67	37.10

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Secara grafis ketimpangan pendapatan dapat digambarkan dengan suatu kurva yang disebut dengan Kurva Lorentz. Kurva ini memberi gambaran tentang bagaimana pendistribusian pendapatan penduduk suatu wilayah atau daerah pada suatu waktu. Kurva Lorentz didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumah tangga/penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh rumah tangga/penduduk daerah tersebut, apabila unit pendapatan ditata menurut urutan menaik.

Gambar 7. Gini Ratio Antar Kecamatan, 2008



BAB V

KESIMPULAN

1. Selama 4 tahun terakhir pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Badung yang di *-proxy-*kan dari pengeluaran perkapita mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 460.391,- pada tahun 2005 menjadi Rp. 654.391,- pada tahun 2008.
2. Dengan adanya peningkatan rata-rata pendapatan perkapita telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat, dari konsumsi makanan ke non makanan, utamanya pada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
3. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pola konsumsi penduduk perkotaan dengan penduduk perdesaan.
4. Adanya kecenderungan masyarakat makin praktis dengan mengkonsumsi makanan dan minuman jadi sehingga konsumsi kelompok makanan didominasi oleh konsumsi makanan jadi yang mencapai 35,80 persen dari total pengeluaran makanan.
5. Konsumsi kelompok non makanan didominasi oleh pengeluaran perumahan yang mencapai 43,44 persen dari total pengeluaran non makanan.
6. Peningkatan pendapatan ternyata diiringi dengan peningkatan ketimpangan yang terlihat dari peningkatan nilai Gini Ratio serta penurunan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk Kabupaten Badung
Menurut Kecamatan Tahun 2008

Kelompok Pengeluaran	Kecamatan						Badung
	Kuta Selatan	Kuta	Kuta Utara	Mengwi	Abiansemal	Petang	
< 321 215	254,879	279,990	253,882	235,864	246,895	251,286	235,523
321 215 - 389 869	357,576	363,370	362,723	348,672	364,028	356,010	340,096
389 869 - 468 264	442,107	400,425	414,814	429,159	427,198	425,096	393,873
468 264 - 516 866	498,725	493,975	494,682	495,694	493,681	-	466,206
516 866 - 571 419	546,415	549,394	550,676	542,054	541,549	532,768	518,357
571 419 - 638 892	610,418	592,167	606,819	599,460	602,873	616,072	576,565
638 892 - 719 726	658,727	679,259	673,516	674,994	671,098	681,708	642,063
719 726 - 846 361	793,305	796,601	778,513	772,594	774,710	731,076	743,689
846 361 - 1 072 490	924,905	939,472	925,578	947,104	935,430	-	898,033
> 1 072 490	1,645,992	1,290,576	1,324,396	1,701,449	1,301,085	-	1,427,842
Rata-rata Kecamatan	733,995	775,756	749,873	619,371	507,912	336,519	654,851

Gini Ratio	0.3056	0.1863	0.1922	0.2971	0.2115	0.1942	0.2673
40% Terendah	21.43	27.66	28.23	22.81	26.92	28.73	23.32
40% Sedang	37.75	40.13	40.72	36.51	40.73	38.88	39.58
20% Tertinggi	40.82	32.21	31.05	40.68	32.35	32.38	37.10

Lampiran 2. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Kuta Selatan, 2008

Persentil	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Perkapita	Penduduk	Proporsi Penduduk	Total Pengeluaran	Persentase	Persentase Kumulatif	Persentase Kumulatif ke i+1	Persentase Kumulatif ke i+1 (%)
1	273,703	7,698	10.93	2,106,966,401	4.08	4.08	4.08	0.0045
2	363,104	7,449	10.58	2,704,763,338	5.23	9.31	13.39	0.0142
3	456,676	6,413	9.11	2,928,662,193	5.67	14.98	24.29	0.0221
4	518,452	6,437	9.14	3,337,273,521	6.46	21.43	36.41	0.0333
5	582,794	7,574	10.76	4,414,081,062	8.54	29.98	51.41	0.0553
6	633,473	7,038	10.00	4,458,384,153	8.63	38.60	68.58	0.0685
7	718,852	5,675	8.06	4,079,483,176	7.89	46.50	85.10	0.0686
8	838,019	7,823	11.11	6,555,823,600	12.69	59.18	105.68	0.1174
9	1,063,443	7,957	11.30	8,461,819,655	16.37	75.55	134.74	0.1523
10	1,990,760	6,346	9.01	12,633,359,875	24.45	100.00	175.55	0.1582
		70,410	100.00	51,680,616,976	100.00			0.6944

Gini Ratio 0.3056

Distribusi pendapatan	Rendah	21.43
	Sedang	37.75
	Tinggi	40.82

Lampiran 3. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Kuta, 2008

Persentil	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Perkapita	Penduduk	Proporsi Penduduk	Total Pengeluaran	Persentase	Persentase Kumulatif	Persentase Kumulatif ke i+1	Persentase Kumulatif ke i+1 (%)
1	424,474	6,842	10.27	2,904,251,618	5.62	5.62	5.62	0.0058
2	524,637	6,439	9.66	3,378,140,813	6.53	12.15	17.77	0.0172
3	573,660	6,847	10.27	3,927,850,619	7.60	19.75	31.90	0.0328
4	634,728	6,444	9.67	4,090,184,293	7.91	27.66	47.41	0.0459
5	683,566	6,440	9.66	4,402,167,712	8.52	36.18	63.84	0.0617
6	744,902	6,442	9.67	4,798,657,855	9.28	45.46	81.64	0.0789
7	843,580	7,051	10.58	5,948,080,496	11.51	56.97	102.43	0.1084
8	927,631	6,032	9.05	5,595,473,112	10.82	67.79	124.76	0.1129
9	1,020,993	7,450	11.18	7,606,396,354	14.71	82.51	150.30	0.1680
10	1,359,742	6,651	9.98	9,043,645,254	17.49	100.00	182.51	0.1822
		66,638	100.00	51,694,848,125	100.00			0.8137

Gini Ratio 0.1863

Distribusi pendapatan	Rendah	27.66
	Sedang	40.13
	Tinggi	32.21

Lampiran 4. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Kuta Utara, 2008

Persentil	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Perkapita	Penduduk	Proporsi Penduduk	Total Pengeluaran	Persentase	Persentase Kumulatif	Persentase Kumulatif ke i+1	Persentase Kumulatif ke i+1 (%)
1	386,088	9,312	11.19	3,595,250,986	5.76	5.76	5.76	0.0064
2	512,204	7,774	9.34	3,981,877,463	6.38	12.14	17.90	0.0167
3	578,656	8,231	9.89	4,762,920,437	7.63	19.77	31.91	0.0315
4	627,321	8,419	10.11	5,281,415,962	8.46	28.23	48.00	0.0485
5	667,326	7,975	9.58	5,321,925,152	8.53	36.75	64.98	0.0623
6	728,094	8,440	10.14	6,145,114,773	9.84	46.60	83.35	0.0845
7	783,871	7,834	9.41	6,140,848,868	9.84	56.43	103.03	0.0970
8	863,885	9,042	10.86	7,811,250,989	12.51	68.95	125.38	0.1362
9	995,783	7,254	8.71	7,223,413,080	11.57	80.52	149.47	0.1302
10	1,356,307	8,966	10.77	12,160,646,050	19.48	100.00	180.52	0.1944
		83,247	100.00	62,424,663,759	100.00			0.8078

		Gini Ratio	0.1922
Distribusi pendapatan	Rendah		28.23
	Sedang		40.72
	Tinggi		31.05

Lampiran 5. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Mengwi, 2008

Persentil	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Perkapita	Penduduk	Proporsi Penduduk	Total Pengeluaran	Persentase	Persentase Kumulatif	Persentase Kumulatif ke i+1	Persentase Kumulatif ke i+1 (%)
1	248,043	9,860	9.91	2,445,704,232	3.97	3.97	3.97	0.0039
2	341,752	10,478	10.53	3,580,877,870	5.81	9.78	13.75	0.0145
3	388,371	9,378	9.43	3,642,141,434	5.91	15.69	25.48	0.0240
4	433,386	10,122	10.18	4,386,732,486	7.12	22.81	38.51	0.0392
5	483,157	10,373	10.43	5,011,786,943	8.13	30.95	53.76	0.0561
6	513,421	10,019	10.07	5,143,964,405	8.35	39.30	70.25	0.0708
7	563,828	8,466	8.51	4,773,367,082	7.75	47.05	86.34	0.0735
8	674,129	11,219	11.28	7,563,056,604	12.28	59.32	106.37	0.1200
9	895,853	9,923	9.98	8,889,551,380	14.43	73.75	133.07	0.1328
10	1,678,948	9,632	9.68	16,171,624,689	26.25	100.00	173.75	0.1682
		99,470	100.00	61,608,807,124	100.00			0.7029

Gini Ratio		0.2971
Distribusi pendapatan	Rendah	22.81
	Sedang	36.51
	Tinggi	40.68

Lampiran 6. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Abiansemal, 2008

Persentil	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Perkapita	Penduduk	Proporsi Penduduk	Total Pengeluaran	Persentase	Persentase Kumulatif	Persentase Kumulatif ke i+1	Persentase Kumulatif ke i+1 (%)
1	216,000	7,590	10.24	1,639,443,455	4.35	4.35	4.35	0.0045
2	316,217	7,146	9.64	2,259,683,843	6.00	10.36	14.71	0.0142
3	375,545	7,555	10.19	2,837,244,757	7.54	17.89	28.25	0.0288
4	422,994	8,034	10.84	3,398,336,004	9.03	26.92	44.81	0.0486
5	474,839	6,892	9.30	3,272,588,223	8.69	35.61	62.53	0.0581
6	509,986	7,498	10.12	3,823,876,618	10.16	45.77	81.38	0.0823
7	547,406	6,627	8.94	3,627,662,646	9.64	55.40	101.17	0.0904
8	586,919	7,856	10.60	4,610,835,848	12.25	67.65	123.05	0.1304
9	652,286	7,356	9.92	4,798,216,399	12.74	80.39	148.04	0.1469
10	974,858	7,572	10.22	7,381,624,772	19.61	100.00	180.39	0.1843
		74,126	100.00	37,649,512,566	100.00			0.7885

Gini Ratio		0.2115
Distribusi pendapatan	Rendah	26.92
	Sedang	40.73
	Tinggi	32.35

Lampiran 7. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kecamatan Petang, 2008

Persentil	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Perkapita	Penduduk	Proporsi Penduduk	Total Pengeluaran	Persentase	Persentase Kumulatif	Persentase Kumulatif ke i+1	Persentase Kumulatif ke i+1 (%)
1	145,963	1,548	6.92	225,950,659	3.00	3.00	3.00	0.0021
2	219,456	3,642	16.29	799,260,549	10.62	13.62	16.63	0.0271
3	265,446	1,443	6.45	383,038,536	5.09	18.71	32.34	0.0209
4	284,268	2,652	11.86	753,879,879	10.02	28.73	47.45	0.0563
5	302,095	1,554	6.95	469,455,736	6.24	34.97	63.70	0.0443
6	328,134	2,775	12.41	910,571,850	12.10	47.07	82.04	0.1018
7	361,521	2,103	9.40	760,278,174	10.10	57.17	104.24	0.0980
8	393,320	1,998	8.93	785,854,232	10.44	67.62	124.79	0.1115
9	470,962	2,982	13.34	1,404,407,469	18.66	86.28	153.90	0.2052
10	620,141	1,665	7.45	1,032,535,029	13.72	100.00	186.28	0.1387
		22,362	100.00	7,525,232,113	100.00			0.8058

Gini Ratio 0.1942

Distribusi pendapatan	Rendah	28.73
	Sedang	38.88
	Tinggi	32.38